



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 18 FEBRUARI 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Warga Damarsi Buduran Demo Tuntut pengembalian Aset Desa

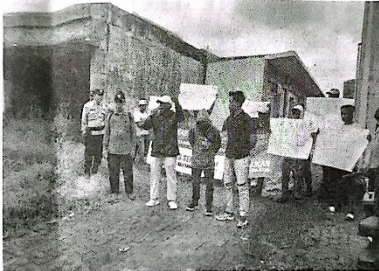
Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Warga Desa Damarsi, Buduran melakukan aksi demonstrasi di lokasi Tanah Kas Desa (TKD), Selasa 17 Februari 2026. Massa aksi memegang spanduk atau tulisan berisi tuntutan di area TKD.

Tulisannya antara lain: Rakyat Menggugat, Kembalikan Tanah Desa Kami, Kades Damarsi dan BPD Harus Bertanggungjawab Atas Hilangnya Tanah Kas Desa Kami, Kejaksan Negeri Sidoarjo, Usut Pejabat Desa Damarsi Yang Terlibat Konspirasi Hilangnya Tanah Desa Kami, Kejaksan Negeri Sidoarjo Tangkap Pihak Pihak Yang Menjual Tanah Desa Kami dan banyak tulisan lagi yang berisi tuntutan warga.

Salah satu Koordinator aksi, Suwari, menegaskan, warga Desa Damarsi minta kejelasan tentang hilangnya Tanah Kas Desa Damarsi. Suwari juga mendesak agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola tanah kas desanya.

"Kami ingin kejelasan, ini tanah



Aksi demo warga Damarsi, Buduran.

Damarsi punya hak. Kami melihat banyak aset desa yang hilang sedikit demi sedikit, tapi tanah kas desa ini yang paling terancam benderang disalahgunakan. Untuk itu kami mendesak agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera memproses laporan masyarakat terkait dugaan korupsi

tegus Suwari dalam orasinya.

Orator lainnya, Refido Al Firmansyah, menguraikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus TKD ini. Dia dan warga Desa Damarsi meminta agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera melakukan pengusutan kasus dugaan penyalah-

yang terlibat.

Dikatakan, mereka yang terlibat kasus ini melanggar pidana, berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/desa.

"Pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan dalam pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 Mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," tegasnya.

Refido juga meminta Pemerintah Desa Damarsi mengembalikan aset tanah kas

Warga Damarsi Buduran Demo Tuntut pengembalian Aset Desa

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Warga Desa Damarsi, Buduran melakukan aksi demonstrasi di lokasi Tanah Kas Desa (TKD), Selasa 17 Februari 2026. Massa aksi memegang spanduk atau tulisan berisi tuntutan di area TKD.

Tulisannya antara lain: Rakyat Menggugat, Kembalikan Tanah Desa Kami, Kades Damarsi dan BPD Harus Bertanggungjawab Atas Hilangnya Tanah Kas Desa Kami, Kejaksan Negeri Sidoarjo, Usut Pejabat Desa Damarsi Yang Terlibat Konspirasi Hilangnya Tanah Desa Kami, Kejaksan Negeri Sidoarjo Tangkap Pihak Pihak Yang Menjual Tanah Desa Kami dan banyak tulisan lagi yang berisi tuntutan warga.

Salah satu koordinator aksi, Suwari, menegaskan, warga Desa Damarsi minta kejelasan tentang hilangnya Tanah Kas Desa Damarsi. Suwari juga mendesak agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola tanah kas desanya.

"Kami ingin kejelasan, ini tanah kita, semua warga yang ber KTP



Aksi demo warga Damarsi, Buduran.

Damarsi punya hak. Kami melihat banyak aset desa yang hilang sedikit demi sedikit, tapi tanah kas desa ini yang paling terancam benderang disalahgunakan. Untuk itu kami mendesak agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera memproses laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam tata kelola aset Desa Damarsi,"

tegus Suwari dalam orasinya.

Orator lainnya, Refido Al Firmansyah, menguraikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus TKD ini. Dia dan warga Desa Damarsi meminta agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera melakukan pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh semua pihak

yang terlibat.

Dikatakan, mereka yang terlibat kasus ini melanggar pidana, berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/desa.

"Pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan dalam pasal 3 Undang Undang no 31 tahun 1999 Mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," tegasnya.

Refido juga meminta Pemerintah Desa Damarsi mengembalikan aset tanah kas desa tersebut ke fungsi semula. (md/rus)

Cegah Macet, Dishub Tambah Durasi Lampu Hijau di Perempatan Gedangan

SIDOARJO - Keluhan masyarakat terkait kemacetan di perempatan Gedangan masih cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dishub Sidoarjo mengatur ulang lampu traffic light (TL) area tersebut. Durasi lampu hijau yang sebelumnya hanya 20 detik, ditambah 20 detik.

Upaya dishub dilakukan untuk mengurangi antrean. Terutama untuk kendaraan dari arah Surabaya. Kendaraan seringkali menumpuk dan melahirkkan kemacetan panjang.

Kebijakan penambahan durasi lampu sudah diberlakukan. Tidak saja di perempatan Gedangan. Kebijakan juga diberlakukan di tiga titik

rawan macet lainnya. Yakni Bawah Layang Waru, Jalan Medaeng, dan Perempatan MCD Juanda, Sedati.

Sekretaris Dishub Sidoarjo Dwiwahjho Mardisunu mengatakan, sudah ada kajian sebelum kebijakan diberlakukan. Kajian terkait panjang antrean dan kepadatan di masing-masing arah sebelum menambah durasi," katanya.

Khusus untuk flyover Waru, lanjut Dwiwahjho, penyesuaian durasi hanya difokuskan pada arus menuju Surabaya. Pengaturan dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas. "Nanti dievaluasi lagi secara berkala," tambah Dwiwahjho. (ful/hen)



RAMBU LALU LINTAS: Durasi lampu hijau di traffic light perempatan Gedangan ditambah 20 detik untuk mengurangi antrean kendaraan.



RUSAK PARAH: Bupati Subandi (tiga dari kanan) mengecek kondisi Jalan Setiabudi, Krian, kemarin (17/2).

Jalan Setiabudi Dibeton Tahun Depan

Bupati Nilai Tambal Sulam Tidak Efektif

SIDOARJO - Kerusakan Jalan Setiabudi, Krian sudah cukup akut. Tak bisa hanya sekadar ditambah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan jalan bisa dibeton tahun depan karena tingkat kerusakan yang cukup tinggi.

Saat sidang, Subandi mengatakan bahwa tambal sulam tak lagi efektif untuk ruas dengan lalu lintas padat seperti Jalan Setiabudi. "Yang lewat besar-besaran. Maka kami

siapkan untuk betonisasi tahun 2027," katanya kemarin (17/20). Dia menambahkan perbaikan sementara akan dilakukan sambil menunggu dibeton tahun 2027.

"Kami menilai perbaikan Jalan Setiabudi sangat penting. Itu akses pedagang," tambah Subandi. Dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi. Terutama saat ada angkutan besar yang melanggar.

DPRD Kawal

Perbaikan Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Mohammad Nizar

mengatakan, upaya perbaikan jalan harus diikuti evaluasi. Jika tambal sulam sudah tak efektif, pemkab harus menerapkan betonisasi. "Kalau tiap tahun ditambah lalu rusak lagi, berarti harus dievaluasi," kata Nizar.

Baginya, overlay sebagai tahap penguatan sebelum betonisasi sudah tepat. Meski, pelaksanaannya harus dikawal. Nizar mengaku akan memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan. (ful/hen)



KABUPATEN SIDOARJO

Warga Damarsi Demo Tuntut Pengembalian TKD

Sidoarjo, 18 Februari 2026

Warga Desa Damarsi, Buduran melakukan aksi demonstrasi di lokasi Tanah Kas Desa (TKD), Selasa 17 Februari 2026. Massa aksi memegang spanduk atau tulisan berisi tuntutan di area TKD.

Tulisannya antara lain: Rakyat Menggugat, Kembalikan Tanah Desa Kami, Kades Damarsi dan BPD Harus Bertanggungjawab Atas Hilangnya Tanah Kas Desa Kami, Kejaksan Negeri Sidoarjo, Usut Pejabat Desa Damarsi Yang Terlibat Konspirasi Hilangnya Tanah Desa Kami, Kejaksan Negeri Sidoarjo Tangkap Pihak Pihak Yang Menjual Tanah Desa Kami dan banyak tulisan lagi yang berisi tuntutan warga.

Salah satu koordinator aksi, Suwari, menegaskan, warga Desa Damarsi minta kejelasan tentang hilangnya Tanah Kas Desa Damarsi. Suwari juga mendesak agar Kejaksan Negeri Sidoarjo segera mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola tanah kas desanya.

"Kami ingin kejelasan, ini tanah kita, semua warga yang ber KTP



Aksi demo warga Damarsi yang menuntut pengembalian TKD.

Dikatakan, mereka yang terlibat kasus ini melanggar pidana, berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/desa.

"Pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan dalam pasal 3 Undang Undang no 31 tahun 1999 Mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," tegasnya.

Refido juga meminta Pemerintah Desa Damarsi mengembalikan aset tanah kas desa tersebut ke fungsi semula. (md/rus)

Refido juga meminta Pemerintah Desa Damarsi mengembalikan aset tanah kas desa tersebut ke fungsi semula. (md/rus)

Warga Damarsi Buduran Demo Tuntut Pengembalian Aset Desa

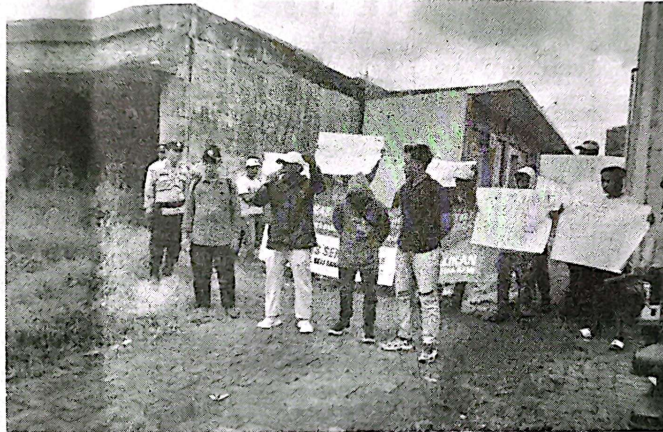
Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Warga Desa Damarsi, Buduran melakukan aksi demonstrasi di lokasi Tanah Kas Desa (TKD), Selasa 17 Februari 2026. Massa aksi memasang spanduk atau tulisan berisi tuntutan di area TKD.

Tulisannya antara lain; Rakyat Menggugat, Kembalikan Tanah Desa Kami, Kades Damarsi dan BPD Harus Bertanggungjawab Atas Hilangnya Tanah Kas Desa Kami, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Usut Pejabat Desa Damarsi Yang Terlibat Konspirasi Hilangnya Tanah Desa Kami, Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tangkap Pihak Pihak Yang Menjual Tanah Desa Kami dan banyak tulisan lagi yang berisi tuntutan warga.

Salah satu koordinator aksi, Suwari, menegaskan, warga Desa Damarsi minta kejelasan tentang hilangnya Tanah Kas Desa Damarsi. Suwari juga mendesak agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola tanah kas desanya.

"Kami ingin kejelasan, ini tanah kita, semua warga yang ber KTP



Aksi demo warga Damarsi, Buduran.

Damarsi punya hak. Kami melihat banyak aset desa yang hilang sedikit demi sedikit, tapi tanah kas desa ini yang paling terang benderang disalahgunakan. Untuk itu kami mendesak agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera memproses laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam tata kelola aset Desa Damarsi,"

tegas Suwari dalam orasinya.

Orator lainnya, Refido Al Firman-syah, menduga adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus TKD ini. Dia dan warga Desa Damarsi meminta agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera melakukan pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh semua pihak

yang terlibat.

Dikatakan, mereka yang terlibat kasus ini melanggar pidana, berdasarkan Undang Undang No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/desa.

"Pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan dalam pasal 3 Undang Undang no 31 tahun 1999 Mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," tegasnya.

Rafido juga meminta Pemerintah Desa Damarsi mengembalikan aset tanah kas desa tersebut ke fungsi semula. (md/rus)

Cegah Macet, Dishub Tambah Durasi Lampu Hijau di Perempatan Gedangan

SIDOARJO - Keluhan masyarakat terkait kemacetan di perempatan Gedangan masih cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dishub Sidoarjo mengatur ulang lampu *traffic light* (TL) area tersebut. Durasi lampu hijau yang awalnya hanya satu menit ditambah 20 detik.

Upaya dishub dilakukan untuk mengurangi antrean. Terutama untuk kendaraan dari arah Surabaya. Kendaraan seringkali menumpuk dan melahirkan kemacetan panjang.

Kebijakan penambahan durasi lampu sudah diberlakukan. Tidak saja di perempatan Gedangan. Kebijakan juga diberlakukan di tiga titik

rawan macet lainnya. Yakni Bawah Layang Waru, Jalan Medaeng, dan Perempatan MCD Juanda, Sedati.

Sekretaris Dishub Sidoarjo Dwitjahjo Mardisunu mengatakan, sudah ada kajian sebelum kebijakan diberlakukan. Kemacetan terjadi pada jam sibuk. "Kami lihat panjang antrean dan kepadatan di masing-masing arah sebelum menambah durasi," katanya.

Khusus untuk flyover Waru, lanjut Dwijahjo, penyesuaian durasi hanya difokuskan pada arus menuju Surabaya. Pengaturan dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas. "Nanti dievaluasi lagi secara berkala," tambah Dwijahjo. (ful/hen)



RAMBU LALU LINTAS: Durasi lampu hijau di traffic light perempatan Gedangan ditambah 20 detik untuk mengurangi antrean kendaraan.



PEMKAB SIDOARJO

RUSAK PARAH: Bupati Subandi (tiga dari kanan) mengecek kondisi Jalan Setiabudi, Krian, kemarin (17/2).

Jalan Setiabudi Dibeton Tahun Depan

Bupati Nilai Tambal Sulam Tidak Efektif

SIDOARJO - Kerusakan Jalan Setiabudi, Krian sudah cukup akut. Tak bisa hanya sekadar ditambal. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan jalan bisa dibeton tahun depan karena tingkat kerusakan yang cukup tinggi.

Saat sidang, Subandi mengatakan bahwa tambal sulam tak lagi efektif untuk ruas dengan lalu lintas padat seperti Jalan Setiabudi. "Yang lewat besar-besaran. Maka kami

siapkan untuk betonisasi tahun 2027," katanya kemarin (17/20). Dia menambahkan perbaikan sementara akan dilakukan sambil menunggu dibeton tahun 2027.

"Kami menilai perbaikan Jalan Setiabudi sangat penting. Itu akses pedagang," tambah Subandi. Dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi. Terutama saat ada angkutan besar yang melanggar.

DPRD Kawal Perbaikan

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Mohammad Nizar

mengatakan, upaya perbaikan jalan harus diikuti evaluasi. Jika tambal sulam sudah tak efektif, Pemkab harus menerapkan betonisasi. "Kalau tiap tahun ditambal lalu rusak lagi, berarti harus dievaluasi," kata Nizar.

Baginya, overlay sebagai tahap penguatan sebelum betonisasi sudah tepat. Meski, pelaksanaannya harus dikawal. Nizar mengaku akan memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan. (ful/hen)

Jawa Pos

Warga Damarsi Demo Tuntut Pengembalian TKD

Sidoarjo, Memorandum

Warga Desa Damarsi, Kecamatan Buduran berunjuk rasa di lokasi tanah kas desa (TKD), Selasa (17/2). Dalam aksinya, mereka memasang spanduk atau tulisan berisi beberapa aspirasi.

Aspirasi itu di antaranya "Rakyat Mengugat, Kembalikan Tanah Desa Kami, Kades Damarsi dan BPD Harus Bertanggungjawab Atas Hilangnya Tanah Kas Desa Kami, Kejaksaan Negeri Sidoarjo Usut Pejabat Desa Damarsi Yang Terlibat Konspirasi Hilangnya Tanah Desa Kami, Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tangkap Pihak Pihak Yang Menjual Tanah Desa Kami" dan banyak tulisan lagi yang berisi tuntutan warga.

Salah satu koordinator aksi, Suwari menegaskan, warga Desa Damarsi minta kejelasan tentang hilangnya TKD. Suwari juga mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo segera mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola TKD.

"Kami ingin kejelasan, ini tanah kita, semua warga yang ber-

-KTP Damarsi punya hak. Kami melihat banyak aset desa yang hilang sedikit demi sedikit, tapi tanah kas desa ini yang paling terang benderang disalahgunakan. Untuk itu kami mendesak agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera memproses laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam tata kelola aset Desa Damarsi," tegas Suwari.

Orator lainnya, Refido Al Firmansyah, menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam kasus TKD ini. Dia dan warga Desa Damarsi meminta agar Kejaksaan Negeri Sidoarjo segera melakukan pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh semua pihak yang terlibat.

Dikatakan, mereka yang terlibat kasus ini melanggar pidana, berdasarkan Undang



Aksi demo warga Damarsi yang menuntut pengembalian TKD.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, utamanya Pasal 2 dan Pasal 3

mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/desa.

"Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, meng-

atur tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau pere-

konomian negara. Dan dalam pasal 3 Undang Undang no 31 tahun 1999 Mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," bebernya.

"Serta Pasal 18 undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Mengatur tentang pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak/tidak bergerak," tambahnya.

Karenanya, Rafido meminta Pemdes Damarsi mengembalikan aset TKD ke fungsi semula berupa persawahan.

Ketua BPD Damarsi, Karmadi yang berada di lokasi demo, bahkan mengungkapkan fakta mengungkapkan. Menurutnya, pada 2025, ada developer melayangkan somasi kepada kepala desa. Somasi itu juga juga mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp 3,2 miliar

yang diklaim pengembangan diserahkan ke pihak desa. Muncul juga janji kompensasi sebesar Rp 500 juta yang hingga kini keberadaan uang tersebut tidak diketahui pihak BPD maupun warga.

"Tapi soal dana dari pengembangan itu, sebenarnya warga tidak pernah diajak komunikasi dan musyawarah soal uang kompensasi. BPD sudah sering kali menegur kepala desa terkait permasalahan TKD ini, bahkan kami pernah mengundang kepala desa dan Pak Agus (pengembang red) untuk musyawarah terkait TKD," ceritanya.

Di kejaksaan, penanganan kasus ini dinilai warga masih jalan di tempat. Hal itu karena belum adanya informasi yang diterima warga soal pemanggilan pihak yang sudah mereka laporkan. Karena itu, warga mengancam akan melakukan aksi lanjutan ke kantor Kejari Sidoarjo, bahkan sampai Kejaksaan Agung RI di Jakarta apabila kasus ini tidak segera ditindaklanjuti. (kri/san/epe)



AUDIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

Ilustrasi mudik gratis oleh Pemkab Sidoarjo.

Pendaftaran Sudah Dibuka, Siapkan 18 Bus Mudik Gratis

KOTA-Tradisi pulang kampung warga Kota Delta dipastikan bakal lebih nyaman dan aman tahun ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi meluncurkan program Mudik Gratis 2026 dengan menyiapkan 18 armada bus untuk mengantar warga ke berbagai daerah di Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan program ini merupakan agenda rutin tahunan yang tidak hanya membantu meringankan beban biaya masyarakat, tetapi juga menjadi upaya menekan angka ke-

celakaan lalu lintas saat arus mudik Lebaran.

"Tahun ini kita siapkan kurang lebih 18 bus. Rutenya ada yang ke arah barat dan ada yang ke arah timur. Setiap tahun pasti agenda ini kita siapkan untuk warga Sidoarjo," ujar Subandi, Selasa (17/2).

Ia menjelaskan, rute yang disediakan mencakup wilayah Jawa Timur bagian barat hingga ujung timur. "Tujuannya mulai dari Banyuwangi hingga daerah barat juga ada. Semua sudah kita siapkan dengan 18 bus tersebut," tambahnya.

Pendaftaran Dibuka Sejak 10 Februari 2026. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan pendaftaran program Mudik Gratis 2026 telah dibuka sejak Selasa, 10 Februari 2026.

Berbeda dari sistem pendaftaran digital penuh, tahun ini Pemkab Sidoarjo menerapkan sistem kombinasi online dan verifikasi langsung (offline) guna memastikan validitas data calon penumpang.

Alur pendaftarannya: Scan barcode yang

● Ke Halaman 10

Sambungan

Jalan Rusak Parah...

Ia pun menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo

segera menghitung kebutuhan anggaran agar pengerjaan bisa dimulai pekan depan. Perbaikan direncanakan sepanjang kurang lebih 500 meter.

"Silakan dihitung, kita kerjakan

pakai overlay. Minggu depan sudah harus mulai dikerjakan," ujarnya.

Menurut Subandi, pengaspalan ulang menggunakan hotmix menjadi solusi jangka menengah dengan daya tahan minimal satu hingga dua tahun, sembari menunggu program betonisasi permanen. Ia menargetkan perbaikan jalan di titik-titik krusial bisa tuntas sebelum Lebaran.

"Rabu besok saya rapatkan lagi. Mudah-mudahan kita kejar, saat Lebaran sudah tidak ada lagi jalan seperti ini. Saya juga kaget masih ada kondisi seperti ini, makanya Sabtu-

Minggu pun kami turun untuk melihat progres di lapangan," tambahnya.

Perbaikan akan mencakup ruas depan Kantor Telkom Krian hingga tikungan pintu masuk pasar. Selain DPUBMSDA, Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) juga diminta bergerak cepat agar penanganan awal segera dilakukan. Optimisme bupati disambut harapan besar para pengguna jalan dan pedagang. Yuni (57), pedagang minuman yang setiap hari berjualan di sekitar lokasi, mengaku kondisi jalan kerap dikeluhkan.

"Sudah sering diperbaiki, diaspal ala

kadarnya. Tapi kalau hujan deras dan banjir, rusak lagi. Beberapa kali sudah diperbaiki, tetap saja rusak. Mungkin bahannya kurang bagus," keluhnya.

Menurut Yuni, buruknya sistem drainase turut memperparah kerusakan. Setiap hujan deras, air kerap menggenang dan mengikis lapisan aspal yang baru diperbaiki.

Kini, warga berharap perbaikan dengan metode overlay benar-benar menjadi solusi yang lebih tahan lama, sehingga aktivitas ekonomi di sekitar Pasar Baru Krian bisa kembali berjalan lancar dan aman. (dik/vga)

Remisi Khusus Imlek,...

"Remisi ini adalah bentuk penghargaan atas perilaku baik warga binaan selama mengikuti program pembinaan. Kami berharap ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan nantinya kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," tambahnya.

Sohibur juga memastikan seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa

membedakan status kewarganegaraan. Selama narapidana memenuhi syarat administratif dan substantif, hak tersebut tetap diberikan.

Sementara itu, peringatan Imlek di Lapas Porong berlangsung khidmat dan sederhana. Meski dilaksanakan dalam suasana terbatas, momen tersebut tetap menjadi wujud pemenuhan hak beribadah serta penghormatan terhadap keberagaman di lingkungan pemasyarakatan. (sur/vga)

Pendaftaran Sudah Dibuka,...

tersedia untuk mengunduh formu-

Kartu Keluarga (KK).

"Tiket yang tidak terverifikasi oleh panitia di kantor Dishub akan di-

alun Sidoarjo, Jl. Cokronegoro No. 1
Daftar Rute Mudik Gratis 2026
Rute yang disediakan Pemkab Sido-





RESPONS CEPAT: Bupati Sidoarjo Subandi (kaos putih) saat sidak jalan rusak di Jalan Setiabudi, Kecamatan Krian, Selasa (17/2).

DIKY SANGHATADATI SIDOARJO

Jalan Rusak Parah di Setiabudi Krian Diperbaiki Minggu Depan

Kerusakan parah di Jalan Raya Setiabudi, tepat di depan Pasar Baru Krian, akhirnya mendapat perhatian serius dari Bupati Sidoarjo, Subandi. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa (17/2), ia menegaskan tak ingin lagi melihat perbaikan setengah hati yang hanya mengandalkan tambal sulam.

Diky Putra Sansiri,
Wartawan Radar Sidoarjo

■ Bupati Sidak Lokasi

Di lokasi, Subandi tampak meninjau langsung kondisi jalan yang berlubang cukup dalam. Kerusakan di jalur utama distribusi bahan pokok itu memang memprihatinkan.

Sejumlah lubang menganga dengan diameter mencapai sekitar satu meter dan kedalaman kurang

lebih 25 sentimeter menjadi ancaman bagi pengendara, terutama pedagang sayur, buah, dan daging yang setiap hari melintas menuju pasar.

Titik terparah berada di tikungan selatan pintu masuk pasar. Aspal di lokasi tersebut nyaris habis, menyisakan bongkahan batu besar yang membahayakan pengguna jalan.

Subandi menilai pola perbaiki-

kan sebelumnya menggunakan coldmix tidak efektif dan hanya bersifat sementara. Karena itu, ia meminta perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pengaspalan ulang secara menyeluruh.

"Nah ini bagaimana antisipasinya? Kita harus overlay, tidak boleh hanya tambal. Kalau tidak overlay, tidak akan bertahan. Ditambal sebentar, rusak lagi," tegasnya di lokasi sidak.

● Ke Halaman 10

